



PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Acara : Seminar Nasional Teknik, Komputer dan Rekayasa (SAINTIKS) 2017,
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia.

Dr. Ir. H Dadang Mohamad Masoem, MSCE.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Barat

STRUKTUR PAPARAN

INDONESIA DAN JAWA BARAT

PERAN DINAS PMPTSP

PERAN SISTEM INFORMASI DALAM PMPTSP





INDONESIA DAN JAWA BARAT



Sumber Data: Bank Indonesia, 2017

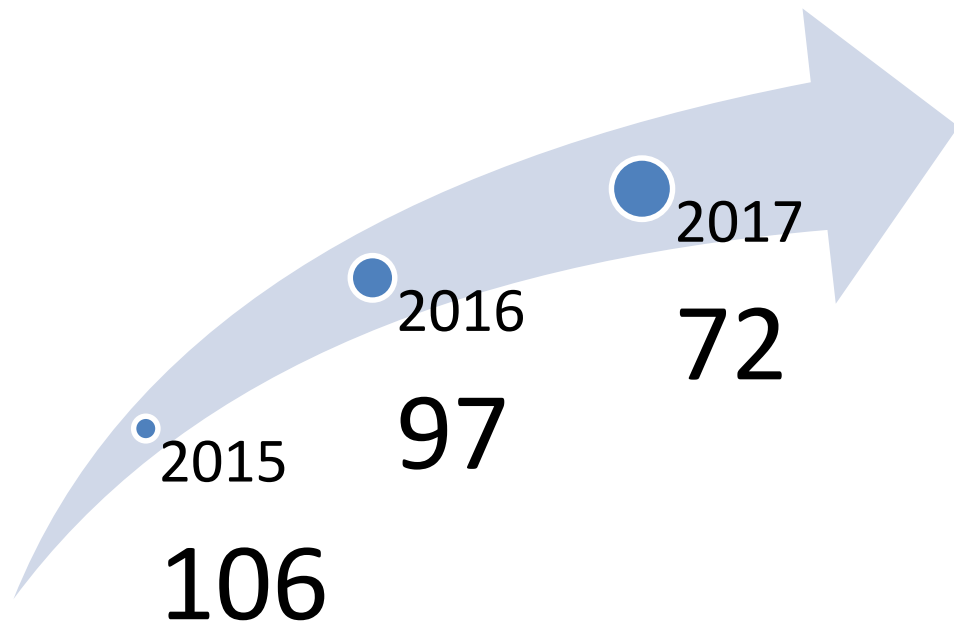
GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX RANKINGS

Indonesia ranked **36** in 2017 – 2018

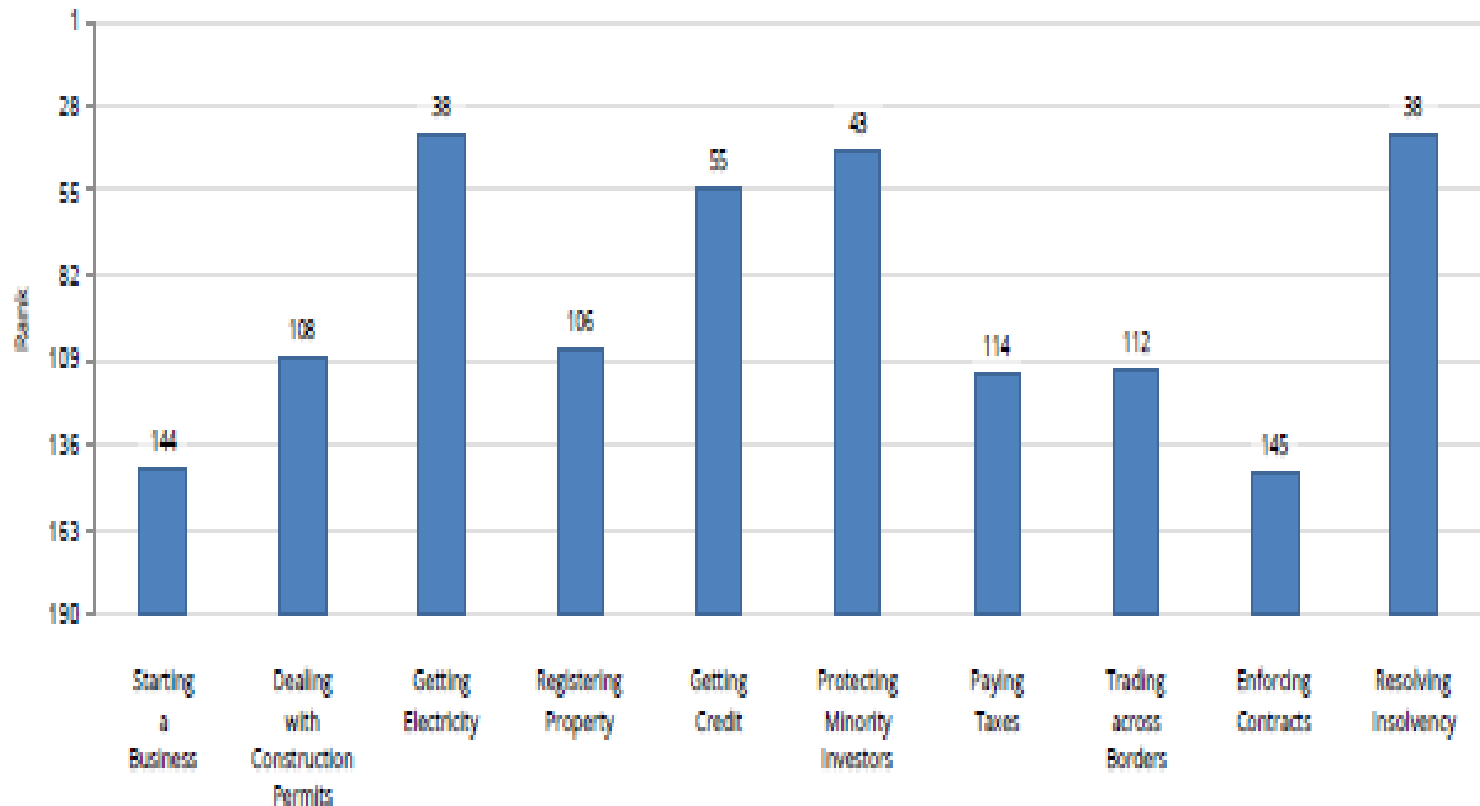
Rank	Country	Score	Rank	Country	Score	Rank	Country	Score
1	Switzerland	5.86	14	Canada	5.35	27	China	5.00
2	United States	5.85	15	Taiwan, China	5.33	28	Iceland	4.99
3	Singapore	5.71	16	Israel	5.31	29	Estonia	4.85
4	Netherlands	5.66	17	United Arab Emirates	5.30	30	Saudi Arabia	4.83
5	Germany	5.65	18	Austria	5.25	31	Czech republic	4.77
6	Hongkong SAR	5.53	19	Luxembourg	5.23	32	Thailand	4.72
7	Sweden	5.52	20	Belgium	5.23	33	Chile	4.71
8	United Kingdom	5.51	21	Australia	5.19	34	Spain	4.70
9	Japan	5.49	22	France	5.18	35	Azerbaijan	4.69
10	Finland	5.49	23	Malaysia	5.17	36	Indonesia	4.68
11	Norway	5.40	24	Ireland	5.16	137	Yemen	2.87
12	Denmark	5.39	25	Qatar	5.11			
13	New Zealand	5.37	26	Korea, Rep	5.07			



KEMUDAHAN BERBISNIS DI INDONESIA



Peningkatan sebesar
34 Peringkat



JAWA BARAT



Luas Wilayah 35.377,76 km²

Koordinat: 6°45'S 107°30'E

Dataran Rendah, Gunung dan Laut



Populasi : 46.709.569 jiwa (2016)

Kepadatan: 1.256 jiwa/ km².

Jenis Kelamin : 50,70 % Laki-laki, 49,30% Perempuan



Ibu Kota : BANDUNG

18 Kabupaten dan 9 Kota

West Java
In Indonesia

Indonesia
In The World



JAWA BARAT PROFIL

18,79
MILLION
PRODUCTIVE AGE

ADJACENT
TO
TANJUNG PRIOK
SEAPORT

CENTER
OF
MULTINATIONAL
COMPANY

31%
CONTRIBUTION
TO NATIONAL
INVESTMENT REALIZATION

18%
OF INDONESIAN
POPULATION

EDUCATION
SITE
CENTER

ADJACENT
TO
JAKARTA

18,04%
GOODS
EXPORT

ADJACENT TO
SOEKARNO HATTA
INTERNATIONAL AIRPORT

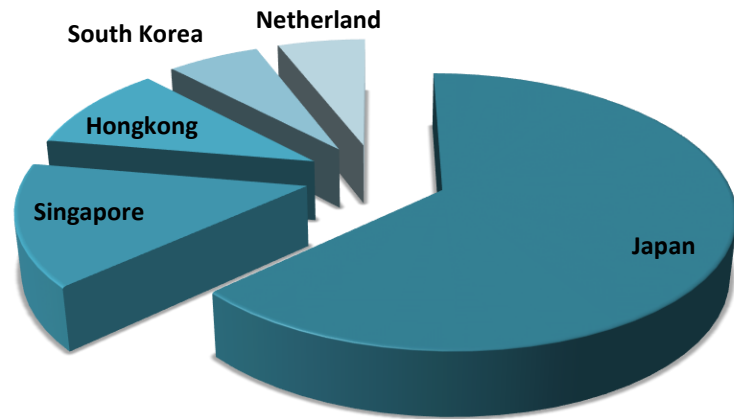


Sumber Data: Bank Indonesia, 2017

JAWA BARAT

PENANAMAN MODAL DI JAWA BARAT

5 Top Investor Berdasarkan Investasi (USD)



 **JAPAN**
2,867,285,500

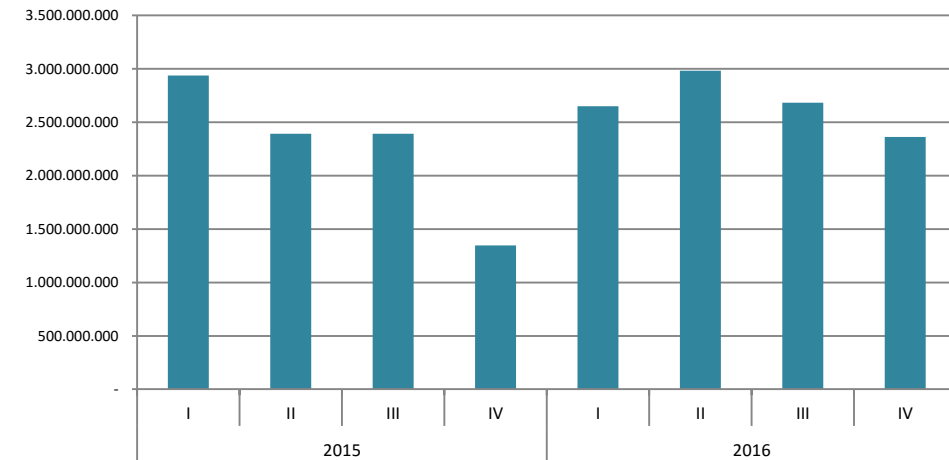
 **SINGAPORE**
658,444,200

 **HONGKONG**
465,290,300

 **SOUTH KOREA**
280,520,700

 **NETHERLAND**
266,434,100

Jawa Barat Realisasi Investasi (USD)



Total Investasi 2015

USD 9,068,429,315

Total Investasi 2016

USD
10,674,976,280

Sumber Data: Dinas PMPTSP Prov. Jabar, 2017



PENANAMAN MODAL DI JAWA BARAT

Peringkat Realisasi Investasi

	Kabkot	Investasi	Rasio
1	Kab. Bekasi	56.605.906.554.429	39,57
2	Kab Karawang	27.348.913.426.217	19,12
3	Kab Bogor	16.334.331.273.573	11,42
4	Kota Bekasi	8.663.566.310.596	6,06
5	Kota Bandung	7.240.702.070.518	5,06

Sektor yang Diminati

	Sektor	Investasi	Rasio
1	Perdagangan & reparasi	39.106.216.912.252	27,34
2	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi	30.704.199.892.390	21,46
3	Industri Logam, Mesin & Elektronika	12.376.350.524.670	8,65
4	Industri makanan	11.686.284.747.415	8,17
5	Perumahan, kawasan industri & perkantoran	11.018.772.643.537	7,70

Peringkat Jumlah Proyek

	Sektor	Investasi	Rasio
1	Perdagangan & reparasi	39.106.216.912.252	27,34
2	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi	30.704.199.892.390	21,46
3	Industri Logam, Mesin & Elektronika	12.376.350.524.670	8,65
4	Industri makanan	11.686.284.747.415	8,17
5	Perumahan, kawasan industri & perkantoran	11.018.772.643.537	7,70

Peringkat Penyerapan Tenaga Kerja

	Kabkot	Jumlah	Rasio
1	Kab. Bekasi	183.407	38,23
2	Kab . Bogor	51.634	10,76
3	Kab . Karawang	45.056	9,39
4	Kota Bekasi	23.315	4,86
5	Kab. Subang	21.874	4,56





PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DINAS PM-PTSP)

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI JAWA BARAT



Kelembagaan

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Operasional

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (232 Jenis Izin dan Non-Izin);

TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP



TUGAS POKOK

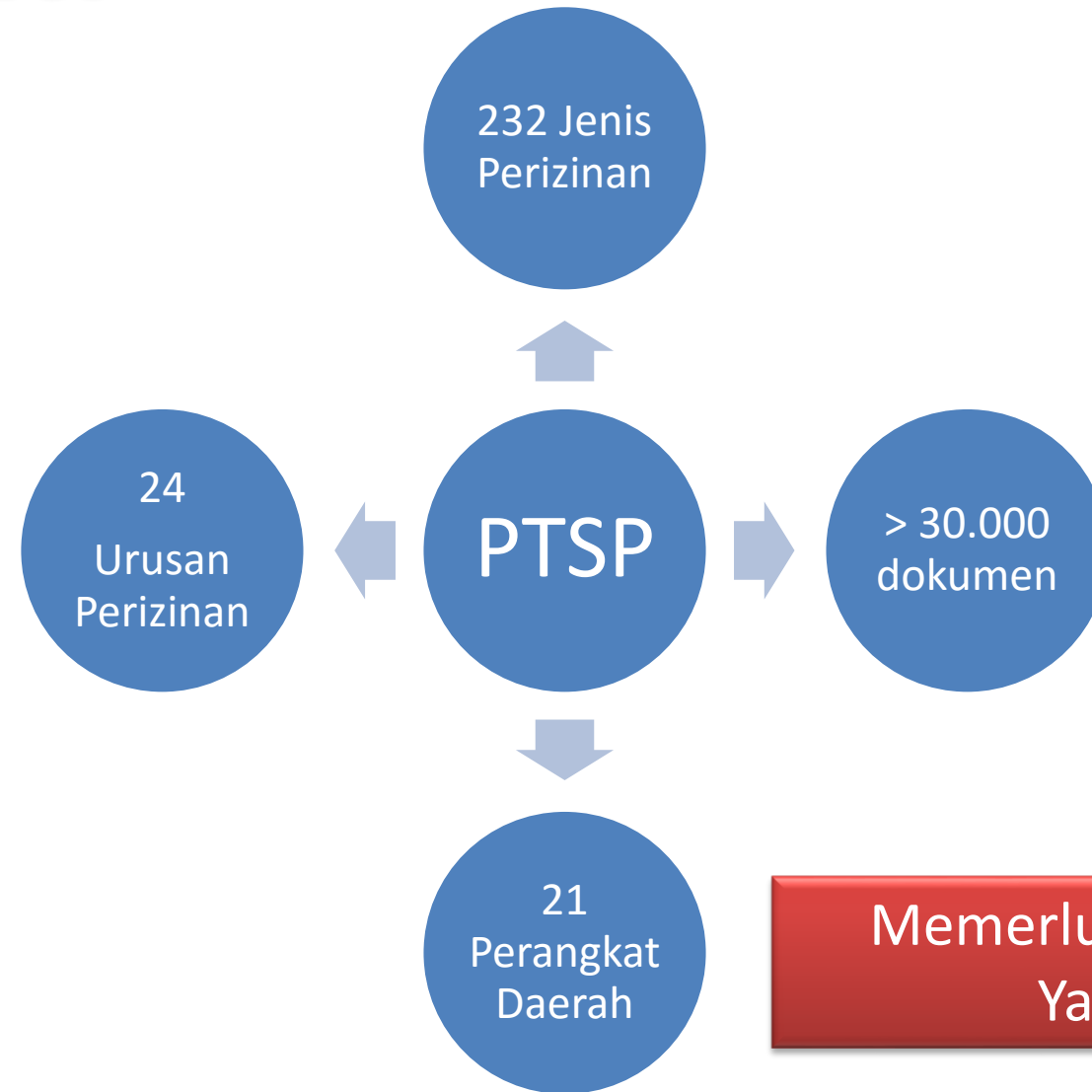
- Pengembangan iklim penanaman modal,
- Promosi penanaman modal,
- Pelayanan penanaman modal,
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
- Data dan sistem informasi penanaman modal, serta
- Pelayanan terpadu satu pintu

FUNGSI

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



OUTPUT PTSP



Memerlukan Sistem Informasi
Yang Terintegrasi

Jumlah Jenis Perizinan Yang Dilayani

NO	SEKTOR/SUBBIDANG	IZIN	NON IZIN	JUMLAH
1	PERKEBUNAN	5	3	8
2	PERIKANAN	8	3	11
3	KEHUTANAN	17	9	26
4	KESEHATAN	7	21	28
5	PERHUBUNGAN	38	13	51
6	KETENAGAKERJAAN	9	9	18
7	PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	1	4	5
8	PENDIDIKAN	2	0	2
9	PETERNAKAN	4	11	15
10	KEBINAMARGAAN	2	0	2
11	PENGAIRAN	2	0	2

Berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 31 Tahun 2016





NO	SEKTOR/SUBBIDANG	IZIN	NON IZIN	JUMLAH
12	ESDM	21	3	24
13	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	2	5
14	PENANAMAN MODAL	4	0	4
15	PENATAAN RUANG	1	4	5
16	LINGKUNGAN HIDUP	3	1	4
17	PERTANAHAN	1	1	2
18	SOSIAL	1	2	3
19	KOPERASI DAN UMKM	2	0	2
20	PERTANIAN	2	0	2
21	KEPARIWISATAAN & KEBUDAYAAN	6	5	11
	JUMLAH	140	92	232

Berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 31 Tahun 2016





sistem informasi pelayanan perizinan untuk publik

PERAN SISTEM INFORMASI DALAM PMPTSP



Latar Belakang Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Perpres 97 thn 2014 ttg Penyelenggaraan PTSP, disebutkan bahwa pelayanan perizinan menggunakan PSE (Pelayanan Secara Elektronik)
- Pergub Jabar No 31 Thn 2016 ttg Juklak Perda Prov Jabar No 7 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, disebutkan bahwa pelayanan perizinan Jabar dengan SIMPATIK
- Membutuhkan aplikasi berbasis WEB karena memiliki layanan gerai di kota Bogor, Cirebon dan Garut serta layanan mobil keliling (SMS atau *Site Mobile Service*)
- Transparansi pelayanan perizinan kepada masyarakat
- Kemenkominfo menyediakan model aplikasi perizinan SICANTIK (Aplikasi Cerdas Pelayanan Perizinan Untuk Publik) berbasis web dan Open Source yang diimplementasikan BPPT saat itu sebelum menjadi Dinas PMPTSP.

Tahapan Implementasi SIMPATIK

SOSIALISASI SICANTIK DI KEMENKOMINFO – FEBRUARI 2013



BIMBINGAN TEKNIS SICANTIK UNTUK PEGAWAI – MARET 2013



PELATIHAN ToT UNTUK TENAGA IT DI KEMENKOMINFO – APRIL 2013



CUSTOM PERIZINAN SICANTIK SESUAI KEWENANGAN PROVINSI – MEI 2013



INSTALASI SERVER DI DINAS KOMINFO JABAR – JULI 2013



USER ACCEPTANCE TEST/REVISI SICANTIK DI KEMENKOMINFO - SEPTEMBER 2013



UJICoba LAYANAN MULAI DARI GERAJ – OKTOBER 2013



OPERASIONALISASI DAN PERUBAHAN NAMA SICANTIK MENJADI SIMPATIK (SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PUBLIK) – JANUARI 2014

Fitur SIMPATIK

DAFTAR PERIZINAN DAN PERSYARATAN

- PEMOHON DAPAT MENGECEK DAFTAR IZIN, PERSYARATAN, DAN DURASI

PENDAFTARAN ONLINE

- PEMOHON DAPAT MENDAFTAR PERIZINAN SECARA ONLINE TANPA JARAK, TANPA TATAP MUKA DAN TANPA BATASAN WAKTU

e-TRACKING STATUS IZIN

- PEMOHON DAPAT MEMANTAU SAMPAI SEJAUH MANA PROSES PERMOHONAN IZINNYA MELALUI CEK STATUS IZIN

PENGADUAN ONLINE

- PEMOHON DAPAT MENGADUKAN PERMASALAHAN SECARA ONLINE YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI

OPEN SOURCE PROGRAM

- APLIKASI TIDAK BERBAYAR DAN DAPAT DIREPLIKASI KEPADA INSTASI PMPTSP SESUAI KEBUTUHAN

IMPLEMENTASI INOVASI SIMPATIK



WORKSHOP OLEH KPK

Workshop KPK – Prov. Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan MoU dengan Gubernur dari 17 Provinsi pada tanggal 25 Nopember 2016, terdiri dari

1. Prov. Sumatera Utara
2. Prov. Bengkulu
3. Prov. NTT
4. Prov. Papua
5. Prov. Sulawesi Tengah
6. Prov. Banten
7. Prov. Maluku Utara
8. Prov. Kalimantan Selatan
9. Prov. Sumatera Barat
10. Pemerintah Aceh
11. Prov. Riau
12. Prov. Papua Barat
13. Prov. Lampung
14. Prov. Kalimantan Timur
15. Prov. Sulawesi Selatan
16. Prov. Jawa Tengah
17. Prov. Jawa Timur

SEMULA

Pendaftaran
Antrian di loket
gerai layanan

Informasi dan
Pengecekan Proses
Perizinan
Pemohon harus
berkonsultasi
dengan petugas
layanan

Pengaduan
Penyelesaian
permasalahan
perizinan tidak
transparan

Pengelolaan data
arsip
Arsip dikelola
manual dan tidak
terstruktur

INOVASI SIMPATIK

Pendaftaran Online
Pendaftaran perizinan secara
online (kecuali perizinan yang
berkaitan dengan Tata Ruang
masih manual)

Informasi dan e-Tracking
Informasi dan cek status
proses perizinan dapat
diakses melalui website
dan handphone

Pengaduan Online
Penyelesaian
permasalahan
perizinan secara online
dan transparan

Arsip Digital
Pengelolaan data arsip
digital dan kemudahan
pencarian data

HASIL

Pendaftaran lebih mudah,
tanpa jarak, tanpa tatap
muka dan dilakukan dari
mana saja secara online.

Informasi persyaratan Izin
dan Cek Status Izin lebih
mudah diakses melalui
website dengan notifikasi
SMS dan email

Penyelesaian
permasalahan pengaduan
masyarakat secara
transparan sebagai
pengendalian perizinan

Pengelolaan data arsip
lebih terstruktur sehingga
memudahkan evaluasi
dan pelaporan

Workshop KPK – Provinsi Jawa Barat

1

- Workshop e-SAMSAT, TPP dan SIMPATIK di Hotel Best Western Premier Le Grande Bandung diikuti peserta dari 17 Pemerintah Provinsi

2

- Workshop Batch 1 tanggal 23-25 Nopember 2016 diikuti oleh Pemprov. Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung

3

- Workshop Batch 2 tanggal 29 Nopember-1 Desember 2016 diikuti oleh Pemprov. Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan

4

- Tanggal 25 Nopember 2016 ditandatangani Nota Kesepahaman antara KPK, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur dari 17 Provinsi mengenai percepatan implementasi e-government dari tiga aplikasi inovasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Replikasi SIMPATIK oleh 10 Provinsi dengan Nama Baru

REPLIKASI PROVINSI SUMATERA UTARA

- PADA AKHIR DESEMBER 2016 DINAS PMPTSP PROV. SUMATERA UTARA MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SIMPEL PATEN (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU EFEKTIF DAN EFISIEN)**

REPLIKASI PROVINSI BENGKULU

- PADA AKHIR JANUARI 2017 DINAS PMPTSP PROV . BENGKULU BERHASIL MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SIPANSE (SISTEM INFORMASI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK)**

REPLIKASI PROVINSI NTT

- PADA PERTENGAHAN FEBRUARI 2017 DINAS PMPTSP PROV. NTT BERHASIL MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SPESIAL (SISTEM PELAYANAN BERBASIS APLIKASI)**

REPLIKASI PROVINSI PAPUA

- PADA AWAL MARET 2017 DINAS PMPTSP PROV. PAPUA BERHASIL MEREPLIKASI DENGAN NAMA BARU **PPO (PAPUA PERIZINAN ONLINE)**

REPLIKASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

- PADA PERTENGAHAN APRIL 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH MEREPLIKASI DENGAN NAMA **E-SIIDAT (ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU)**

REPLIKASI PROVINSI BANTEN

- PADA PERTENGAHAN JUNI 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI BANTEN MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SIPEKA (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ELEKTRONIK TERBUKA)**

REPLIKASI PROVINSI MALUKU UTARA

- PADA PERTENGAHAN BULAN JULI 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI MALUKU UTARA MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SISUPERDOKO (SISTEM SEMUA LAYANAN PERIZINAN DAN DOKUMEN ONLINE)**

REPLIKASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- PADA AKHIR BULAN JULI 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SIMAPAN (SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE)**

REPLIKASI PROVINSI SUMATERA BARAT

- PADA AKHIR BULAN AGUSTUS 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI SUMATERA BARAT MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SIP SAKATO (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK)**

REPLIKASI PEMERINTAH ACEH

- PADA AKHIR BULAN OKTOEBER 2017 DINAS PMPTSP PEMERINTAH ACEH MEREPLIKASI DENGAN NAMA **SAPA (SISTEM APLIKASI PERIZINAN ACEH)**

Kebutuhan Replikasi SIMPATIK

HARDWARE

- JARINGAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DAN INTERNET
- SERVER MILIK SENDIRI (DISKOMINFO) ATAU SEWA HOSTING DILUAR
- KOMPUTER DAN PRINTER

SOFTWARE

- SISTEM OPERASI SERVER LINUX ATAU WINDOWS SERVER
- DATABASE MYSQL DAN PHP VERSI 5
- OPEN OFFICE DOCUMENT

BRAINWARE

- TENAGA PROGRAMMER UNTUK MENJADI ADMINISTRATOR
- TENAGA OPERATOR APLIKASI SIMPATIK

TRANSFER KNOWLEDGE SIMPATIK

- PELATIHAN TINGKAT ADMINISTRATOR UNTUK INSTALASI DAN CUSTOM
- PELATIHAN TINGKAT OPERASIONAL APLIKASI SIMPATIK

KEUNGGULAN SIMPATIK



DAFTAR JENIS PERIZINAN

Masyarakat dapat mengecek daftar jenis perizinan, persyaratan, formulir dan durasi waktu penyelesaian



PENDAFTARAN DAN PENGADUAN PERIZINAN

Masyarakat dapat mendaftar perizinan dan pengaduan secara online dengan tanpa tatap muka, tanpa jarak dan batasan waktu



E-TRACKING

Masyarakat dapat memantau proses permohonan perizinan yang diajukan secara langsung



OPEN SOURCE PROGRAM

Aplikasi SIMPATIK tidak berbayar dan dapat direplikasi pada instansi PMPTSP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota

PENGEMBANGAN



DIGITAL SIGNATURE

Volume penandatanganan perizinan yang tinggi membutuhkan penandatanganan secara elektronik



GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM)

Aplikasi SIMPATIK dikembangkan dengan pemetaan data lokasi sebaran perizinan di Jawa Barat

SUCCESS STORY SIMPATIK

2013



INOVASI

- Diklat ToT dan UAT di Kemenkominfo
- Instalasi Server SIMPATIK
- Ujicoba dan Diklat Internal

2014



IMPLEMENTASI

Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi secara bertahap dan berkelanjutan

2016



WORKSHOP KPK

Workshop Aplikasi SIMPATIK oleh KPK dan Pemprov Jawa Barat dengan 17 Pemerintah Provinsi

2017



REPLIKASI

Replikasi kepada instansi Dinas PMPTSP pada 17 Provinsi Peserta Workshop KPK

**SIMPATIK DIJADIKAN MODEL REPLIKASI APLIKASI PTSP
OLEH KPK KARENA BERBASIS OPEN SOURCE YANG
MUDAH DAN CEPAT DIIMPLEMENTASIKAN**

Terima Kasih

<http://dpmpdsp.jabarprov.go.id>